

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan saat ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup di setiap negara (Simarmata & Iskandar, 2022). Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dinilai dari produk domestik bruto, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional, yang diukur melalui IPM. IPM mencerminkan kemampuan individu untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, dan memiliki standar hidup yang baik (Jasasila, 2020). Sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada IPM suatu daerah (Nugroho, 2016).

Menurut *the United Nation Development Program* (UNDP), IPM dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), serta taraf hidup yang layak (*decent standard of living*) (Mayapada *et al.*, 2022). Pendidikan yang baik meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, yang berkontribusi pada produktivitas dan pendapatan. Penelitian oleh Nurvita *et al.* (2022) menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di Sulawesi Barat, alokasi anggaran untuk pendidikan masih rendah, berpotensi menghambat peningkatan IPM.



or kesehatan juga berdampak signifikan terhadap IPM. Kesehatan yang memungkinkan individu berfungsi optimal dalam pendidikan dan pekerjaan.

Penelitian menunjukkan bahwa investasi di bidang kesehatan meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki harapan hidup dan akses layanan kesehatan, yang berdampak positif terhadap IPM (Muslihatinningsih *et al.*, 2023). Namun, Sulawesi Barat menghadapi tantangan dalam akses layanan kesehatan, yang tercermin dalam IPM yang masih rendah.

Selain pendidikan dan kesehatan, sektor lain seperti infrastruktur dan ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan IPM. Investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik berkontribusi terhadap mobilitas dan distribusi sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Simorangkir, 2022). Hal ini penting untuk dicatat, mengingat kondisi infrastruktur seperti jalan di Sulawesi Barat yang masih perlu ditingkatkan (Bapperida Sulbar, 2024).

Rendahnya IPM berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya daya saing ekonomi. Berdasarkan data BPS (2023), Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat masih dikategorikan rendah karena secara nasional berada di urutan ketiga terendah setelah Provinsi Papua dan Papua Barat serta urutan pertama terendah di Pulau Sulawesi dengan angka 67,55 tahun 2023. Meskipun IPM di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari 59,74 pada tahun 2010 menjadi 67,55 pada tahun 2023, namun pertumbuhan IPM mengalami variasi. Pencapaian tertinggi sebesar 0,89 terjadi pada tahun 2011, sedangkan terendah 0,25 tercatat pada tahun 2021,



indikan adanya tantangan dalam mempertahankan laju pertumbuhan yang

i. Selain itu, Sulawesi Barat memiliki nilai IPM terendah di antara provinsi-

provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara mencatat IPM tertinggi, yang mencapai 74,36 pada tahun 2023, diikuti oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang juga menunjukkan peningkatan signifikan. Meskipun Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan IPM yang positif, laju peningkatannya yang lebih lambat dibandingkan provinsi lain menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini menyoroti pentingnya strategi pembangunan yang lebih efektif untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi. Mengingat Sulawesi Barat merupakan provinsi yang masih baru dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, perlu adanya perhatian khusus untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Barat.

Studi-studi lain juga menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya dengan IPM. Belanja kesehatan dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Shen *et al.*, 2021). Pertumbuhan ekonomi tersebut akan membawa dampak positif bagi mutu pembangunan manusia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan individu, semakin banyak mereka bisa menghabiskan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan akhirnya meningkatkan IPM.



litian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Nigrum (2023) tentang

pengaruh tingkat pendidikan dan belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian oleh Saputra (2023) fokus pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun kedua penelitian ini memberikan wawasan penting, mereka cenderung mengabaikan sektor lain yang juga bisa berkontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian oleh Ruzima *et al.* (2023) dan Alane *et al.* (2022) menunjukkan bahwa, meskipun belanja pemerintah memiliki pengaruh positif, pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel intervening belanja pemerintah terhadap mutu pembangunan manusia masih kurang diteliti. Penelitian oleh Damanik *et al.* (2022) juga mencatat bahwa pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki dampak positif, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan jika dilihat secara individu.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan inkonsistensi dalam hasil penelitian yang diperoleh terkait pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM, seperti hasil penelitian oleh Muslihatinningsih *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, yang bertentangan dengan temuan dari penelitian Abdillah (2023) yang menyatakan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan dan infrastruktur memiliki dampak positif. Sementara itu, penelitian oleh Ruzima *et al.* (2023) dan Alane *et al.* (2022) menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM, di mana satu penelitian menemukan dampak positif yang signifikan, sementara yang lain menunjukkan dampak yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian yang ada, di

ak semua pengeluaran pemerintah berkontribusi secara positif terhadap



pembangunan manusia, mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami konteks yang mempengaruhi hasil tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari format penganggaran kesehatan dan pendidikan, dan sektor lainnya sehingga hasil yang diperoleh tiap daerah berbeda. Kondisi ini menjadi polemik yang menimbulkan perdebatan tentang peran pemerintah pusat yang belum maksimal dalam menyejahterakan masyarakat melalui implementasi kebijakan IPM di Indonesia.

Kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal antara lain melalui peningkatan tingkat pendidikan dan juga taraf kesehatan baik itu di kota maupun kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak orde lama hingga era reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang terkait dengan pendidikan. Selain pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya juga dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam pembagunan suatu daerah. Hal ini dapat di ukur dengan melihat seberapa besar komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain dapat tercermin dari anggaran pendidikan dan kesehatan yang tertuang dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang bersumber dari APBN

n Pendapatan Belanja Negara). Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya i oleh pemerintahdaerah setelah diberlakunannya desentralisasi fiskal



daerah, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing secara optimal.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditunjukkan pada pembangunan manusia terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor yang sangat penting dalam pembentukan modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan suatu daerah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD". Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut.

Hubungan antara belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya dengan IPM di Sulawesi Barat sangat kompleks. Rendahnya IPM di wilayah ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan anggaran, di mana peningkatan belanja di sektor-sektor tersebut dapat berdampak positif tidak hanya langsung pada IPM, tetapi juga melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Berdasarkan beberapa fakta dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya terhadap mutu pembangunan manusia Sulawesi Barat melalui pertumbuhan ekonomi.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan proposal skripsi ini berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.
2. Apakah belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.
3. Apakah belanja pemerintah sektor lainnya berpengaruh terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor lainnya terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Barat.



1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperluas pemahaman mengenai teori tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap mutu pembangunan manusia di Sulawesi Barat dalam upaya untuk menaikkan indeks pembangunan manusia melalui anggaran pendapatan pemerintah daerah, serta diharapkan bermanfaat untuk penelitian lanjutan khususnya berkaitan dengan pengembangan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

2. Kegunaan Praktis

Untuk peneliti, mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, wawasan, serta informasi terkait masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berharga kepada pihak-pihak terkait dalam merancang dan mengimplementasikan program dan intervensi yang bertujuan untuk tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

3. Kegunaan Kebijakan

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat menjadi rujukan yang mengarahkan pada proses pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata serta merealisasikan keuangan daerah secara merata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia Becker

Teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Gary S. Becker adalah kerangka kerja ekonomi yang sangat berpengaruh untuk memahami pentingnya investasi pada manusia sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Menurut Becker, human capital adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi (Sukoco, 2017). Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai modal yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Becker menekankan bahwa modal manusia adalah aset yang berdampak langsung pada produktivitas individu dan kolektif (PUPR, 2021). Semakin tinggi kualitas modal manusia suatu populasi, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama yang menentukan kualitas modal manusia.

Investasi dalam pendidikan, menurut Becker, memberikan keuntungan jangka panjang karena meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu (Kaloko *et al.*, 2025). Pendidikan memungkinkan individu mengembangkan kemampuan kognitif dan teknis yang diperlukan untuk menjadi pekerja yang efektif di pasar tenaga kerja modern. Selain itu, pendidikan memiliki dampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan, seperti peningkatan



kesadaran sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan stabilitas politik (Rifa'i, 2021). Alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan adalah langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita) (Ginting *et al.*, 2023).

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan komponen penting dalam teori modal manusia. Kesehatan adalah prasyarat dasar bagi produktivitas individu. Individu yang sehat memiliki kapasitas fisik dan mental yang lebih baik untuk bekerja secara efisien dan berkontribusi pada perekonomian. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dianggap sebagai investasi dalam modal manusia yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang (Zhang *et al.*, 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan berkorelasi positif dengan indikator pembangunan manusia seperti harapan hidup, angka kematian bayi yang rendah, dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Penelitian oleh Bloom *et al.* (2020) menunjukkan bahwa peningkatan harapan hidup sebesar 10% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0,3-0,4%.

Efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas modal manusia tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dialokasikan tetapi juga pada efisiensi penggunaannya. Meskipun pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan meningkat, hasilnya tidak selalu signifikan terhadap

alokasi dana tidak tepat sasaran atau jika terjadi penyalahgunaan (Rifa'i, 2021). Peningkatan pengeluaran publik untuk pendidikan di



beberapa negara berkembang tidak selalu menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil pendidikan karena masalah manajemen anggaran dan infrastruktur yang buruk. Hal serupa juga ditemukan dalam sektor kesehatan di mana ketidakefisienan dalam implementasi program sering kali menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Adha *et al.*, 2023).

Dalam konteks pembangunan manusia di negara-negara berkembang seperti Indonesia, teori modal manusia Becker memberikan panduan penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat dilihat sebagai upaya konkret untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan pendanaan serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan manusia. Pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi lain seperti infrastruktur ekonomi, stabilitas politik, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Dalam hal ini, investasi pada modal manusia harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Belanja pemerintah tidak terbatas hanya pada sektor pendidikan dan kesehatan, melainkan meluas ke berbagai sektor lain yang secara sinergis berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

yang tepat sasaran di sektor-sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sebagai contoh, sektor pelayanan



umum, dengan fokus pada efisiensi dan transparansi administrasi publik, berperan penting dalam memastikan program-program pendidikan dan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur administrasi yang baik, didukung oleh investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan akurat, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, serta meminimalkan potensi korupsi dan inefisiensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Modal manusia termasuk sarana untuk meningkatkan kualitas manusia yang dapat mempengaruhi hasil keuangan dan produktivitas (Abidin, 2021).

Namun, membangun modal manusia tidak hanya bergantung pada pendidikan, kesehatan, atau pelayanan umum semata. Sektor ketertiban dan keamanan juga merupakan elemen kunci yang mendukung pengembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Program-program pencegahan kejahatan, penegakan hukum yang adil, serta rehabilitasi bagi pelaku kejahatan berkontribusi pada pengurangan dampak negatif kejahatan terhadap modal manusia. Investasi dalam keamanan juga mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, yang seringkali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kondisi ini dapat dilihat bahwa seseorang akan lebih mudah untuk meningkatkan pendapatan dan kesehatan serta dapat menjamin kehidupan yang lebih baik (Wajdi, 2017).

Dengan adanya stabilitas tersebut, sektor ekonomi dapat bergerak lebih dinamis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan cat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi tetapi membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam



pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan redistribusi pendapatan yang adil juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Becker melihat modal manusia sebagai nilai yang ditambahkan kepada seorang pekerja ketika pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan aset lain yang berguna bagi pemberi kerja atau perusahaan serta bagi proses produksi dan pertukaran (Adriani, 2019).

Perhatian terhadap sektor lingkungan hidup juga tak kalah penting dalam mendukung pembangunan modal manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah fondasi bagi kesehatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengendalian polusi udara dan air, pengelolaan limbah padat dan cair, serta konservasi sumber daya alam, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Investasi dalam energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas masyarakat. Konsep utama dari human capital menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan (Sukoco, 2017).

Tidak hanya itu, sektor perumahan dan fasilitas umum juga berperan besar mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap perumahan yang bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya yang penting untuk



kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program-program perumahan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Investasi dalam infrastruktur sanitasi, seperti sistem pengelolaan air limbah dan toilet umum yang bersih, mencegah penyebaran penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Selain sektor-sektor tersebut, pariwisata juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan modal manusia. Pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti hotel, restoran, dan atraksi wisata, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada akhirnya, sektor perlindungan sosial melengkapi upaya pemerintah dalam membangun modal manusia dengan menyediakan jaring pengaman bagi kelompok rentan. Program-program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan jaminan kesehatan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Program-program ini juga memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi mereka yang membutuhkan, membantu mereka mengatasi kesulitan dan membangun kembali kehidupan mereka.

Keterkaitan antara teori modal manusia dan belanja pemerintah terlihat jelas melalui berbagai sektor tersebut yang saling mendukung satu sama lain.

Investasi strategis di setiap sektor ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses merata terhadap



pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, serta infrastruktur pendukung lainnya. Teori modal manusia Gary Becker memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami pentingnya investasi pada manusia sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi pada pendidikan dan kesehatan adalah penting, tetapi juga perlu didukung oleh investasi di sektor-sektor lain yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan mengarahkan pengeluaran pemerintah secara strategis ke sektor-sektor ini dan memastikan efisiensi implementasinya, negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan IPM secara signifikan. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD total anggaran, dan untuk anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total (Mongan, 2019). Alokasi anggaran yang tepat dan efisien adalah langkah awal dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui komitmen di bidang pendidikan (Rifa'i, 2021).

2.1.2 Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro dan Smith indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Himannudin *et al.*, 2022). Ketika indeks pembangunan manusia meningkat, maka produktivitas penduduk tersebut juga akan meningkat sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah. Pengukuran IPM mulai digunakan pada tahun 1990 oleh



economist Pakistan, Mahbub ul Haq dan telah digunakan secara resmi oleh UNDP
un 1993 dalam laporan tahunannya. Metode pengukuran IPM telah
ada tahun 2010 untuk memperbaiki akurasi dan disebut "metode

baru." Metode ini menskalakan nilai-nilai dari 0 sampai 1, dengan batasan khusus untuk kategori-kategorinya: $IPM \geq 0,800$ kategori sangat tinggi, 0,700–0,799 kategori tinggi, dan 0,600–0,699 kategori sedang (Cahyadi, 2020). Strategi peningkatan IPM biasanya melibatkan serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, dalam bidang kesehatan, pemerintah bisa meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pelajaran kesehatan primer. Di bidang pendidikan, pembangunan perpustakaan dan fasilitas belajar lainnya dapat membantu meningkatkan minat baca dan akses informasi. Sedangkan dalam bidang standar hidup, pemerintah bisa fokus pada meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita dan memfasilitasi akses ke pasar dan pekerjaan yang lebih baik (Cahyadi, 2020).

Terdapat beberapa alasan pentingnya penggunaan indeks komposit ini (Nugroho, 2016). Pertama, indeks yang baru ini mampu menghitung konsep dasar dari pembangunan manusia dalam rangka memperluas pilihan dalam hidupnya. Pilihan-pilihan ini meliputi keinginan untuk hidup lebih lama, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, indeks memuat indikator variabel yang terbatas sehingga memudahkan dalam pengaturannya. Ketiga, indeks ini cenderung lebih terkonsep dan tidak sekadar indeks yang terbagi-bagi. Artinya indeks-indeks yang menyusun terbentuknya indeks pembangunan manusia merupakan satu indeks yang mampu menjelaskan satu kesimpulan secara komprehensif. Keempat, indeks pembangunan manusia mengakomodir pilihan-pilihan sosial maupun ekonomi.



'M adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi, yaitu lama hidup
) , yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan

(*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator), standar hidup (*standart of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita (Yektiningsih, 2018).

Secara teknis ketiga dimensi ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan, serta ekonomi. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat (Hasibuan, 2023). IPM

r pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi



dasar pembangunan manusia, yaitu panjang usia, pengetahuan dan standar hidup.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Paul M Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 yang menekankan pentingnya unsur *human capital* dan teknologi sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Menurut Lucas, selain modal fisik, akumulasi modal manusia sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Romer berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui perkembangan teknologi, dengan fungsi produksi agregat $Y = f(A, K, L, H)$ (Brilyawan, 2021). Dimana, A adalah pengembangan teknologi, K adalah modal fisik, H adalah sumber daya manusia, akumulasi pendidikan dan pelatihan, dan L adalah tenaga kerja.

Teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada manusia (Zenifer *et al.*, 2023). Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja. Teori ini menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi geluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak (Munandar,



Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan saat pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam meraih kesempatan memperoleh penghasilan lebih di masa mendatang (Hasanuddin *et al.*, 2023). Imbalannya adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pembangunan manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kinerja ekonomi.

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

2.1.4.1 Teori W.W Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave (Idris, 2018) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain, tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Menurut Musgrave, proses pembangunan merupakan rasio investasi adap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah pendapatan nasional akan mengecil (Fajri, 2017). Pada tahap lanjut,



Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

2.1.4.2 Teori Adolf Wagner

Teori Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat (Harahap & Amanda, 2022). Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah, yaitu meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan Hukum Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah, yaitu: a) meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban; b) meningkatnya fungsi kesejahteraan; c) meningkatnya fungsi perbankan; dan d) meningkatnya fungsi pembangunan. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang).

Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur π yang timbul dalam masyarakat.



Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Tafalas, 2022).

2.1.4.3 Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara (Latahan *et al.*, 2023). Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Latahan *et al.*, 2023). Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yaitu sebuah tindakan pemerintah dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatur jalannya pemerintahannya yang tergambarkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi, yang telah menjadi subjek penelitian ekstensif di berbagai negara dan periode waktu. Secara umum, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aspek, termasuk investasi infrastruktur, pengeluaran sosial, dan konsumsi pemerintah. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian yang dilakukan pada negara-negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, meskipun dampak ini tidak selalu berlanjut dalam jangka menengah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan ketergantungan pada penerimaan modal (Andariyani, 2024). Selain itu, model pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat meningkatkan tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi awalnya, meskipun efek ini dapat menurun seiring waktu.

Di Indonesia, analisis data panel dari 34 provinsi selama periode 2014-2018 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mendukung pandangan Keynesian bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wahyudi, 2020). Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan pada negara-negara OECD, di mana



peningkatan pengeluaran sosial publik memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berikutnya, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah dan investasi publik tidak memiliki efek signifikan (Connolly & Li, 2016).

Penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada tingkat pembangunan negara. Studi yang menggunakan data panel dari 182 negara menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi efek ini bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan dan tingkat korupsi negara tersebut (Wu *et al.*, 2020). Selain itu, komposisi pengeluaran publik juga penting, peningkatan dalam bagian pengeluaran saat ini memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan, sementara pengeluaran modal yang berlebihan dapat menjadi tidak produktif.

Secara keseluruhan, meskipun ada bukti bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, efek ini sangat bergantung pada jenis pengeluaran, efisiensi alokasi sumber daya, dan konteks ekonomi spesifik dari setiap negara (Wahyudi, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pengeluaran pemerintah harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Mutu Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia, terutama melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan dapat berdampak positif pada



berbagai indikator pembangunan manusia. Studi di Namibia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki hubungan jangka panjang yang signifikan dengan penurunan tingkat fertilitas, angka kematian bayi, dan angka kematian anak di bawah lima tahun. Selain itu, pengeluaran di sektor pendidikan berhubungan positif dengan peningkatan tingkat melek huruf dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar dan perguruan tinggi (Shafuda & De, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan di 55 negara berpenghasilan rendah dan menengah juga menemukan bahwa pengeluaran sosial pemerintah, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan agregat, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Pembangunan Manusia yang Disesuaikan dengan Ketidaksetaraan, dan tingkat kematian anak (Haile & Niño-Zarazúa, 2018). Di Afrika Barat, meskipun ada hubungan positif antara modal manusia dan output ekonomi, interaksi antara modal manusia dan pengeluaran pemerintah menunjukkan hasil yang bervariasi. Pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau korupsi dapat mengurangi efektivitas pengeluaran tersebut (Olofin, 2020).

Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pengeluaran di sektor kesehatan secara khusus memiliki efek positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan masyarakat (Syarifudin & Solihin, 2022). Sama halnya juga di Nigeria, meskipun pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan modal

pengeluaran di sektor pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam



pengeluaran pendidikan untuk mencapai pembangunan modal manusia yang lebih baik (Orji *et al.*, 2017). Penelitian di negara-negara berkembang lainnya juga menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan mendukung peningkatan modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran yang lebih tinggi saja tidak cukup, diperlukan juga intervensi kebijakan lain seperti perbaikan tata kelola dan pengendalian inflasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Di Uni Eropa, analisis data panel menunjukkan bahwa pengeluaran publik di sektor rekreasi, budaya, dan agama memiliki efek positif tertinggi terhadap pembangunan manusia, diikuti oleh sektor kesehatan dan perlindungan sosial (Linhartova, 2021). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap mutu pembangunan manusia. Namun, efektivitas pengeluaran ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan alokasi yang tepat sasaran untuk mencapai hasil yang optimal.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mutu Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi seringkali diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yang mencerminkan peningkatan pendapatan dan produksi suatu negara. Namun, peningkatan ekonomi ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan mutu pembangunan manusia, yang mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Di satu sisi, peningkatan dalam pembangunan

yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan



meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi (Mihaela & Georgiana, 2015). Selain itu, kualitas modal manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan intensitas hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, bukan hanya jumlah tahun sekolah, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Bakare, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling terkait erat. Studi empiris oleh Susila (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali berkontribusi pada peningkatan IPM, yang mencakup indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kondisi kualitas penduduk suatu daerah memiliki hubungan yang erat dengan kondisi perekonomian daerah tersebut, makin baik kondisi perekonomian daerah akan mendongkrak kualitas penduduk tersebut (Susila, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik (Tahan Upoyo Trisno *et al.*, 2022). Di sisi lain, IPM yang tinggi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang sehat dan terdidik cenderung lebih produktif dan inovatif, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, ada hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan IPM, di mana keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan manusia dapat menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun



ihan ekonomi dan pembangunan manusia saling terkait dan dapat saling ng. Ini termasuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi

didistribusikan secara merata dan bahwa investasi dalam pembangunan manusia dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM telah dilakukan oleh beberapa peneliti pada periode waktu yang berbeda.

Penelitian oleh Nigrum (2023) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja bidang kesehatan juga memberikan kontribusi signifikan namun lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti infrastruktur dan kebijakan pemerintahan lokal.

Penelitian oleh Saputra (2023) menganalisis dampak pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data sekunder dari periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menandakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Penelitian oleh Abdillah (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran di sektor kesehatan menunjukkan pengaruh yang lebih lemah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya investasi pemerintah di sektor pendidikan dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan

di wilayah tersebut.



Penelitian oleh Alane (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesadaran sosial di masyarakat. Sebaliknya, pengeluaran di sektor kesehatan menunjukkan dampak negatif dalam jangka pendek dan panjang, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi pengelolaan dana dan kualitas layanan kesehatan yang tersedia. Temuan ini menyoroti perlunya evaluasi dan reformasi dalam pengelolaan pengeluaran kesehatan untuk memastikan bahwa investasi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan berkelanjutan di Arab Saudi.

Penelitian oleh Ruzima *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran publik di sektor kesehatan memiliki efek positif yang signifikan terhadap pembangunan manusia dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa investasi di bidang kesehatan, seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, dapat berdampak langsung pada indikator pembangunan manusia, seperti harapan hidup dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, pengeluaran di sektor pendidikan menunjukkan efek negatif yang signifikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pendidikan yang tidak merata atau ketidakcocokan antara kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, dalam jangka pendek, pengeluaran di kedua sektor tersebut tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia, menandakan bahwa perubahan dalam alokasi anggaran memerlukan waktu untuk tercermin dalam hasil yang lebih baik.



Penelitian oleh Muslihatinningsih *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Sebaliknya, pengeluaran di sektor kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menandakan bahwa investasi di bidang kesehatan memberikan dampak yang lebih langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan harapan hidup dan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Temuan ini menekankan perlunya strategi yang lebih terencana dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengeluaran pemerintah untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar mendukung tujuan pembangunan manusia.

Penelitian oleh Damanik *et al.* (2022) menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap IPM, dampak tersebut tidak signifikan secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi di ketiga sektor tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia, efeknya tidak cukup kuat untuk tercermin dalam angka IPM secara langsung. Namun, ketika dianalisis secara simultan, pengeluaran pemerintah di ketiga sektor tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM, menandakan bahwa kombinasi investasi yang tepat di sektor-sektor tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang lebih baik.

Penelitian oleh Trisno (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi, indikator bahwa variasi dalam pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam IPM. Selain itu, hasil pengujian hipotesis mendukung bahwa

ihan ekonomi berperan sebagai mediator yang efektif dalam



meningkatkan IPM, sehingga implikasinya sangat strategis bagi perencanaan pembangunan sosio-ekonomi di wilayah tersebut

Penelitian oleh Susilowati (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki efek negatif signifikan terhadap IPM. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan IPM, tetapi masih perlu intervensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar IPM optimal.

Penelitian oleh Bailusy (2019) yang membahas kinerja keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia dengan mediasi pertumbuhan ekonomi untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis didukung, sementara dua hipotesis tidak didukung, yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Susila (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang memiliki peran mediasi yang signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dengan variabel-variabel seperti kinerja keuangan dan tingkat pengangguran menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara keseluruhan.

2.4 Kerangka Berpikir

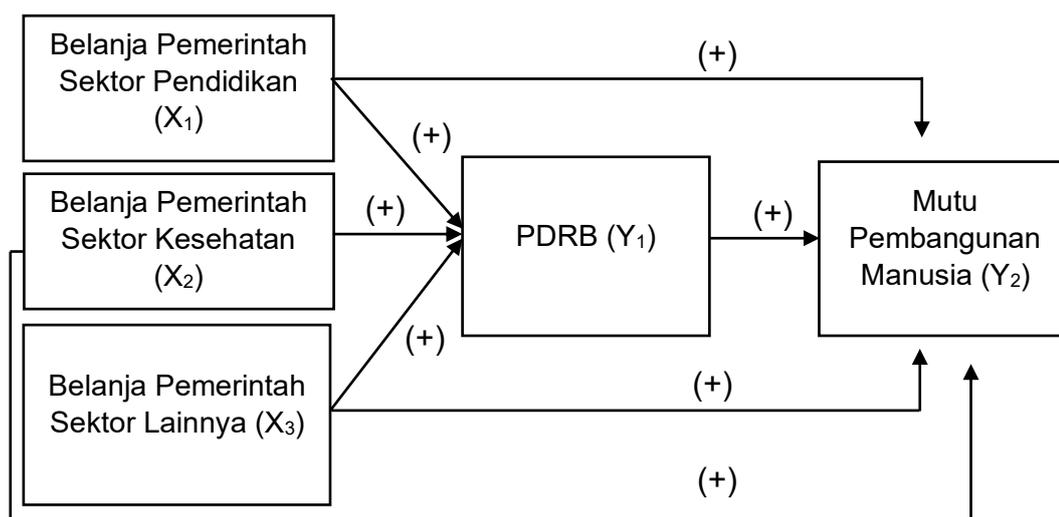
Kerangka berpikir adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Mengacu pada teori

a, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat pengaruh belanja ah sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya terhadap mutu



pembangunan manusia. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel independen belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen mutu pembangunan manusia melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Pengeluaran pemerintah pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan mutu pembangunan manusia. Berikut adalah skema alur dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap mutu pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah, dipandang sebagai investasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Rotinsulu, 2018). Pengeluaran



di sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu (Dju, 2023). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula produktivitasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Rendahnya produktivitas masyarakat miskin seringkali disebabkan oleh rendahnya akses mereka terhadap pendidikan (Dju, 2023). Selain itu, belanja pemerintah pada sektor pendidikan merupakan salah satu faktor input untuk memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi (Rotinsulu, 2018).

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia (Mongan, 2019). Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Peningkatan pengeluaran publik di sektor kesehatan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan *output*, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Dju, 2023). Alokasi dana di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah pada sektor lainnya (seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, dan perlindungan sosial) juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mutu pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah di berbagai sektor akan meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi menyediakan tingkat pendapatan yang tinggi sebagai

pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas modal

Peningkatan pendapatan ini akan memperbesar kapasitas pemerintah



dalam menyediakan fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan manusia (Rotinsulu, 2018). Dengan demikian, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor *input* sekaligus tujuan utama dari proses pembangunan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Belanja pemerintah sektor lainnya berpengaruh positif terhadap mutu pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

